

KEMUNDURAN DEMOKRASI DAN KEBEBASAN PERS DI ASIA TENGGARA: REFLEKSI DARI ENAM NEGARA

DEMOCRATIC DECLINE AND FREEDOM OF THE PRESS IN SOUTHEAST ASIA: A REFLECTION FROM SIX COUNTRIES

M. Fajar Shodiq Ramadhan¹

Prodi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Brawijaya
Jl. Veteran, Kota Malang, 65145
E-mail: fajarramadhan@ub.ac.id

Romel Masykuri

Prodi Ilmu Politik, FISIP, UIN Sunan Ampel
Jl. Ahmad Yani No.117, Kota Surabaya
E-mail: romel.masykuri@dlb.uinsby.ac.id

Diterima: 29 Juni 2021; direvisi 9 November 2021; disetujui 27 November 2021

Abstract

Freedom of the press and the development of democracy are intrinsically intertwined. However, the trend of democratic decline globally also negatively affected press and media freedom, including in Southeast Asia, where scores on the democracy index stagnated and tended to decline. This article selects six of the eleven countries in Southeast Asia as the object of comparison, namely Timor Leste, Indonesia, Philippines, Singapore, Malaysia, and Thailand. A comparison was made on several aspects of press and media freedom in the six selected countries using survey data obtained through V-Dem, Freedom House, and Reporters Sans Frontières (RSF). The descriptive analysis was conducted through literature related to the conditions of democracy and freedom of the press in six countries. The aspects of press and media freedom compared include government censorship efforts, harassment of journalists, media bias, media corrupt, and media self-censorship. Through a comparison of six countries, it generally reflects that the condition of press and media freedom has linearity with the trend of democratic decline. In countries with declining democracy scores, press and media freedom scores also decline. In most Southeast Asian countries, commitments to freedom of the press are generally undermined by laws and regulations that place restrictions, tight controls, and intimidation on media organizations and journalists. This practice most clearly reflects the democratic decline in Southeast Asia.

Keywords: *democratic decline, freedom of the press, Southeast Asia*

Abstrak

Kebebasan pers dan perkembangan demokrasi memiliki jalinan intrinsik. Namun, tren kemunduran demokrasi secara global juga memberi dampak negatif pada kebebasan pers dan media, termasuk di Asia Tenggara. Skor indeks demokrasi di beberapa negara Asia Tenggara mengalami stagnasi dan cenderung menurun. Artikel ini memilih enam dari sebelas negara di Asia Tenggara sebagai obyek perbandingan, yakni Timor Leste, Indonesia, Filipina, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Perbandingan dilakukan terhadap beberapa aspek kebebasan pers dan media di keenam negara yang dipilih menggunakan data survei yang diperoleh melalui V-Dem, Freedom House, dan Reporters Sans Frontières (RSF). Analisis deskriptif dilakukan melalui literatur terkait dengan kondisi demokrasi dan kebebasan pers di enam negara. Adapun aspek kebebasan pers dan media yang diperbandingkan meliputi upaya penyensoran dari pemerintah, gangguan terhadap jurnalis, bias media, korupsi media, dan swasensor media. Melalui perbandingan enam negara, secara umum terlihat bahwa kondisi kebebasan pers dan media memiliki linieritas dengan tren penurunan demokrasi. Di negara dengan penurunan skor demokrasi, skor kebebasan pers dan media juga mengalami penurunan. Di sebagian besar negara Asia Tenggara, komitmen terhadap kebebasan

¹ Kontributor utama

pers umumnya dirusak oleh undang-undang dan beberapa regulasi yang memberi batasan, kontrol ketat, dan mengintimidasi organisasi media dan jurnalis. Praktik ini paling nyata merefleksikan kemunduran demokrasi di Asia Tenggara.

Kata Kunci: kemunduran demokrasi, kebebasan pers, Asia Tenggara

Pendahuluan

Kebebasan pers dan kemajuan demokrasi memiliki jalinan intrinsik. Selama bertahun-tahun, kemajuan demokrasi menunjukkan hubungan positif dengan kebebasan pers. Sebagai komponen penting kemajuan demokrasi, pers dan media yang bebas (serta berkapasitas dan berintegritas) diyakini dapat berperan mengungkap fakta dan kebenaran (Howard, 2019). Di samping itu, pers dan media yang bebas juga dapat memberi informasi kepada warga negara atau konstituen sehingga turut memperkuat demokrasi (Trappel and Tomaz, 2021).

Dalam masyarakat demokratis, pers dan media dianggap sebagai kekuatan keempat – setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kualitas demokrasi salah satunya bertumpu pada warga negara atau pemilih yang memiliki informasi yang baik dan memadai, salah satunya dari lembaga media yang kredibel dan independen. Pers juga dinilai menjalankan peran-peran yang mendukung akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan inklusi dalam proses demokrasi. Lebih jauh, pers dan media diyakini menjadi institusi yang dapat melakukan *checks and balances* dan berperan sebagai *watchdog* (Deane, 2015).

Tren perubahan karena globalisasi, teknologi-teknologi baru, revolusi digital, meluasnya informasi dan meningkatnya autokrasi, memberi dampak yang negatif pada kualitas demokrasi dan kebebasan pers secara global. Berbagai aktor melihat peluang yang dihadirkan oleh perubahan yang meluas tersebut dan berdampak pada kondisi demokrasi. Beberapa rezim di sebagian negara yang menunjukkan kemunduran demokrasi, memanfaatkan lingkungan media untuk menyebarkan disinformasi, memicu polarisasi, dan mengeksploitasi kerentanan demokrasi.

Bahkan, negara-negara otoriter mengerahkan sumber daya untuk membatasi, menyensor, dan memanipulasi informasi. Adanya upaya pembatasan dan pengawasan terhadap pers dan media, dinilai memiliki efek negatif pada kebebasan berekspresi di negara-negara demokrasi dan rezim otoriter.

Pers dan media sering menjadi fokus utama serangan oleh para pemimpin politik yang berupaya secara sistematis melemahkan kebebasan demokratis untuk memegang kendali lebih kuat. Dalam beberapa kasus, pengikisan ruang untuk hak bersuara yang independen menjadi indikasi awal upaya pelemahan lembaga-lembaga demokrasi lainnya. Autokrasi cenderung menggunakan pers dan media, serta menganggap sensor dan penekanan terhadap media merupakan komponen yang melekat (Stier, 2015). Meskipun pers tidak selalu menjadi institusi pertama yang diserang ketika kepemimpinan suatu negara berubah menjadi anti-demokrasi, represi terhadap pers dan media yang bebas merupakan indikasi kuat bahwa hak-hak politik dan kebebasan sipil lainnya berada dalam bahaya.

Data Freedom House menunjukkan bahwa kebebasan pers merosot hampir di seluruh dunia selama satu dekade terakhir. Di antara negara-negara yang termasuk kategori bebas dalam laporan Freedom House pada 2019 lalu, 19 persen (16 negara) telah mengalami penurunan skor kebebasan pers selama lima tahun terakhir (Repucci, 2019). Masalah ini muncul seiring dengan menguatnya populisme sayap kanan, yang merusak kebebasan dasar di banyak negara demokratis. Para pemimpin populis menampilkan diri mereka sebagai pembela mayoritas yang selama ini dirugikan oleh sistem, mengklaim bertindak atas kepentingan bersama menurut apa yang mereka definisikan, serta mengesampingkan

prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan pers, transparansi, dan akuntabilitas.

Dalam konteks Asia Tenggara, ancaman terhadap kebebasan pers memiliki kecenderungan untuk terjadi. Meskipun negara-negara Asia Tenggara berada pada berbagai tahap perkembangan demokrasi, salah satu hal tampak jelas dalam laporan Freedom House adalah tren secara global menunjukkan kemunduran demokrasi dan kebebasan. Artikel ini berupaya memahami kemunduran demokrasi dan keterkaitannya dengan perkembangan kebebasan pers dan media dalam lingkup Asia Tenggara.

digunakan adalah data survei yang diperoleh dan diolah oleh V-Dem, Freedom House, dan Reporters Sans Frontières (RSF).² Sementara uraian deskriptif diperoleh melalui penelusuran literatur terkait dengan kondisi demokrasi dan kebebasan pers di enam negara. Artikel ini dibagi menjadi empat bagian, yakni penjelasan tentang kemunduran demokrasi, kondisi demokrasi di enam negara, perbandingan beberapa aspek terkait kebebasan pers dan media, serta kondisi kebebasan pers dan media di enam negara Asia Tenggara.

Tabel 1. Skor Kebebasan Negara-Negara Asia Tenggara

Negara	Skor Global Freedom (Total Score)					Skor Total Rata-Rata (5 tahun)
	2017	2018	2019	2020	2021	
Timor Leste	65	69	70	71	72	69.4
Indonesia	65	64	62	61	59	62.2
Filipina	63	62	61	59	56	60.2
Singapura	51	52	51	50	48	50.4
Malaysia	44	45	52	52	51	48.8
Thailand	32	31	30	32	30	31
Myanmar	32	31	30	30	28	30.2
Brunei Darussalam	29	28	29	28	28	28.4
Kamboja	31	30	26	25	24	27.2
Vietnam	20	20	20	20	19	19.8
Laos	12	12	14	14	13	13

Sumber: (Freedom House, 2020)

Artikel ini memilih enam dari sebelas negara di Asia Tenggara sebagai obyek perbandingan. Penentuan pilihan enam negara berdasarkan rata-rata total skor selama lima tahun terakhir Global Freedom Score (Freedom House) yang diperoleh negara-negara di Asia Tenggara. Dari rata-rata skor selama lima tahun terakhir, enam negara dengan total rata-rata skor tertinggi adalah Timor Leste, Indonesia, Filipina, Singapura, Malaysia, dan Thailand (Tabel 1).

Artikel ini melakukan perbandingan terhadap beberapa aspek kebebasan pers dan media di keenam negara yang dipilih. Data yang

² Data survei dari Freedom House dipilih karena fokus mereka terhadap aspek kebebasan, di mana kebebasan pers merupakan salah satu elemen penting yang juga menjadi perhatian mereka. Namun, karena data dari Freedom House masih bersifat umum, penulis melengkapi dengan data V-Dem yang menyediakan data lebih kompleks – sebagian data dari V-Dem yang berkenaan dengan kebebasan pers dan media digunakan dalam tulisan ini. Sementara data dari RSF – lembaga yang fokus memberikan perhatian terhadap kebebasan pers – dipilih sebagai data pendukung untuk melihat kondisi kebebasan pers dalam rentang waktu dan negara yang dipilih.

Kemunduran Demokrasi dan Kebebasan Pers

Dibandingkan dengan awal tahun 2000, berbagai pandangan terhadap perkembangan demokrasi saat ini menjadi lebih pesimis. Selama beberapa dekade, demokrasi diyakini menuju pada kondisi terkonsolidasi. Akan tetapi, perkembangan demokrasi selama masa transisi tidak selalu linier. Negara-negara yang umumnya dipandang sebagai negara dengan demokrasi terkonsolidasi ternyata juga mengalami pengikisan, kemerosotan atau kemunduran demokrasi.

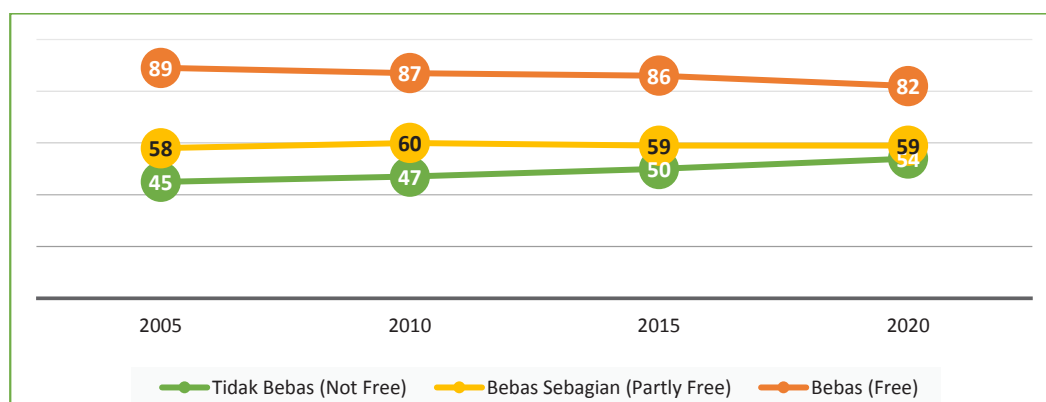
Terdapat berbagai istilah untuk menyebut fenomena kemunduran demokrasi, di antaranya *democratic regression* (Diamond, 2020), *democratic recession* (Levitsky & Way, 2015), *democratic backsliding* (Bermeo, 2016) serta beberapa istilah lainnya. Berbagai definisi tersebut merujuk pada penjelasan bahwa kemunduran demokrasi dapat dipahami sebagai penurunan kualitas demokrasi secara bertahap, yang mengakibatkan sebuah negara kehilangan kualitas demokrasinya, dan menuju pada ciri rezim autokrasi dan otoriter. Seperti yang dijelaskan oleh Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt (2018), sulit untuk menentukan satu momen spesifik yang menunjukkan pemerintah tidak lagi demokratis, mengingat bahwa proses penurunan tersebut bermanifestasi secara perlahan, serta terjadi dalam langkah-langkah yang nyaris tidak tampak.

Secara umum, kemunduran demokrasi disebabkan karena melemahnya institusi politik yang menopang sistem demokrasi di suatu

negara, seperti pemilu yang kurang kompetitif – tanpa sepenuhnya merusak mekanisme pemilu; pembatasan partisipasi – tanpa menghapus hak pilih sebagai aspek pembentuk dan justifikasi demokrasi; serta melemahnya akuntabilitas dengan mereduksi norma pertanggungjawaban dan hukuman kepada pejabat publik (Waldner & Lust, 2018). Kemunduran demokrasi bahkan juga dapat terjadi atas inisiasi pemimpin berkuasa yang dipilih secara demokratis, yang kemudian menjelma menjadi pemimpin dan pemerintahan otoriter. Mereka menggunakan mekanisme hukum (yang seolah-olah memberi legitimasi) untuk tujuan anti-demokrasi. Berbeda halnya dengan kudeta klasik yang menggunakan cara menggulingkan pemerintahan, pelemahan pada demokrasi modern justru berupaya memperlemah sistem demokratis dengan memanipulasinya (Bermeo, 2016).

Levitsky dan Ziblatt (2018) menjelaskan empat ciri utama dari perilaku otoriter yang melemahkan demokrasi, yakni: penolakan (atau pelemahan) komitmen terhadap aturan main demokrasi; penyangkalan legitimasi terhadap oposisi atau lawan politik; mentoleransi atau justru mendorong kekerasan; serta adanya kesiapan untuk membatasi kebebasan sipil dan lawan politik – termasuk pers dan media.

Demokrasi kian menghadapi tantangan dari dalam ketika para pemimpin politik yang terpilih lebih memanfaatkan mekanisme prosedural untuk melegitimasi tindakan anti-demokrasi dengan beragam narasi, misalnya, atas nama stabilitas dan keadilan. Praktik ini secara mudah terefleksi dari praktik manipulasi hukum seperti undang-undang pencemaran nama baik; undang-



Sumber: (Freedom House, 2020)

Grafik 1. Tren Perkembangan Demokrasi Global 2005-2020

undang terorisme; undang-undang penghinaan; dan jenis regulasi lain, yang digunakan untuk mendiskreditkan lawan politik, serta penggunaan retorika demokrasi sebagai pengalih perhatian terhadap praktik anti-demokrasi. Komponen penting demokrasi lainnya seperti pelanggaran hak individu dan kebebasan berekspresi juga mengalami ancaman secara langsung.

Meksi gelombang demokratisasi ketiga, yang dimulai pada pertengahan 1970-an, telah mengubah struktur politik formal yang ada di sebagian besar negara, proses demokratisasi tidak selalu linier. Hanya sejumlah kecil negara yang telah mengalami transisi menuju demokrasi yang berhasil membangun rezim demokrasi yang terkonsolidasi dan berfungsi. Catatan Freedom House di banyak negara, justru menunjukkan lebih tercipta autokrasi daripada demokrasi.

Freedom House mencatat bahwa kemunduran demokrasi dalam rentang waktu jangka panjang semakin mengglobal. Secara statistik, pada tahun 2020 negara-negara yang berjuang menjadi negara demokrasi dan negara-negara di bawah otoritarianisme, menyumbang lebih banyak penurunan status demokrasi secara global. Proporsi negara-negara tidak bebas (*not free*) tahun 2020 adalah yang tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Rata-rata, skor negara-negara tidak bebas mengalami penurunan sekitar 15 persen. Namun, pada saat yang sama, jumlah negara di seluruh dunia yang memperoleh peningkatan skor untuk tahun 2020 adalah yang terendah sejak tahun 2005 (Repucci & Slipowitz, 2021). Hal ini merefleksikan bahwa prospek perubahan tren penurunan demokrasi secara global lebih menantang daripada sebelumnya.

Meningkatnya autokrasi, salah satunya ditandai dengan menurunnya kebebasan, termasuk dalam hal kebebasan pers. Kebebasan pers dan media didefinisikan sebagai sejauh mana setiap negara memberi ruang terhadap aliran berita dan informasi secara bebas di masyarakat, yang bergantung pada: (1) sejauh mana campur tangan politik, misalnya, melalui ada tidaknya intimidasi, penyensoran, atau cara-cara pemaksaan (lingkungan politik); (2) sarana konstitusional dan regulasi (lingkungan

hukum); dan (3) independensi keputusan redaksional dari kepentingan komersial atau pribadi (lingkungan ekonomi) (Freedom House, 2020; McQuail, 1987). Jaminan kebebasan berekspresi dan informasi diakui sebagai hak asasi manusia dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diterima dan diumumkan oleh PBB pada tahun 1948. Dalam deklarasi tersebut dinyatakan bahwa kebebasan pers adalah hak universal, melindungi penyebaran “informasi dan gagasan melalui media apapun dan tanpa memandang batas”. Secara *de facto*, prinsip-prinsip ini sering kali dilanggar oleh pemerintah di sebagian negara.

Di masa lalu, otoritarianisme secara terang-terangan menggunakan kontrol langsung atas sumber informasi dan menekan media dalam penyebaran informasi. Berita dan informasi yang dianggap “subversif” dan yang dipandang “berbahaya” oleh para diktator, sebagian besar telah mengalami penyensoran. Bahkan sampai pada tahap pelarangan penerbitan/penyiaran. Sementara itu, kecenderungan autokrat saat ini, menggunakan mode penyensoran yang berbeda. Menutup media secara semena-mena adalah pilihan terakhir para autokrat baru, karena hal tersebut dapat memberikan kesan buruk bahwa penguasa bertindak melawan hukum.

Para autokrat baru lebih banyak menyediakan instrumen hukum, dengan menerbitkan regulasi baru berkenaan dengan media dan informasi. Regulasi tersebut menjadi instrumen penekan terhadap institusi pers dan media, menjadikan pengaturan penyebaran informasi lebih ketat, dengan ciri redaksi regulasi yang sengaja dibuat samar. Regulasi yang digunakan para aktor politik, terutama penguasa, biasanya berbentuk regulasi anti-terorisme, anti-penyebaran rumor, dan perlindungan privasi. Hal ini sejalan dengan temuan kunci Freedom House yang menyatakan bahwa demokrasi secara umum sedang mengalami penurunan kebebasan sipil dan hak-hak politik. Kondisi demikian menjadikan pers yang bebas sulit diterima begitu saja, bahkan ketika pemerintahan demokratis telah berjalan selama beberapa dekade.

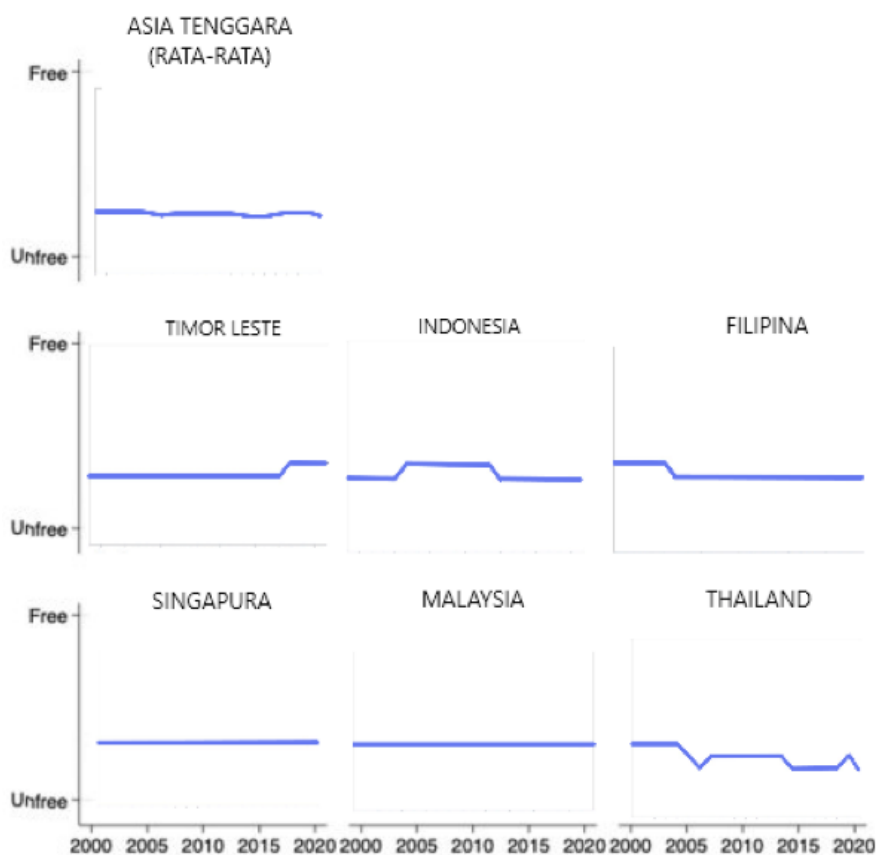
Kondisi Kebebasan di Enam Negara Asia Tenggara: Stagnasi dan Kemunduran

Jika mengamati data Freedom House tentang status kebebasan, tampak bahwa kecenderungan demokrasi di Asia Tenggara berada pada kondisi stagnan. Sebagian besar negara tetap stagnan, berada dalam kondisi “*partly free*” (bebas sebagian) dan “*not free*” (tidak bebas) dalam kurun waktu 20 tahun – termasuk enam negara yang menjadi obyek dalam artikel ini. Hal ini menunjukkan bahwa di satu sisi perkembangan demokrasi berjalan secara bertahap, tetapi mengalami kemunduran kembali dalam hal kebebasan (Indonesia, Filipina, Thailand). Di sisi lain, terdapat negara yang mengalami stagnasi kondisi kebebasan dalam kurun waktu yang panjang (Malaysia dan Singapura). Hanya Timor Leste yang perkembangan kebebasannya mengalami tren positif (Grafik 2).

Dalam kurun tahun 2010 hingga 2020, Freedom House mencatat aspek kebebasan di enam negara Asia Tenggara tersebut secara

umum berada dalam kondisi bebas sebagian (*partly free*) dan kecenderungan mengalami stagnasi dan penurunan. Timor Leste mengalami peningkatan status menjadi bebas (*free*) sejak tahun 2017, sedangkan Thailand mengalami status kebebasan yang memburuk menjadi tidak bebas (*not free*) sejak tahun 2014 (Tabel 2).

Freedom House mencatat bahwa aspek kebebasan di Indonesia terus menurun sejak 2013, dari status bebas (*free*) menjadi bebas sebagian (*partly free*). Kekhawatiran dan gejala kemunduran demokrasi di Indonesia tampak pada beberapa hal. Menajamnya polarisasi sejak tahun 2014 hingga 2019, baik yang terjadi pada pemilu presiden, maupun pemilihan kepala daerah (Warburton, 2020), pengawasan terhadap aktivitas media sosial, pembubaran organisasi, intimidasi terhadap aktivis NGO (*Non-Governmental Organization*) menjadi indikator menurunnya kebebasan di Indonesia. Laporan Freedom House (2014) bahkan mencatat menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia disebabkan karena terbitnya regulasi yang dianggap samar, multi-tafsir,



Sumber: (Freedom House, 2020)

Grafik 2. Perkembangan Status Demokrasi di Enam Negara

Tabel 2. Perkembangan Status Kebebasan Enam Negara 2010-2020³

Negara	Status Kebebasan (Tahun)											Tren
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Indonesia	F	F	F	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	Menurun
Malaysia	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	Stagnan
Filipina	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	Stagnan
Singapura	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	Stagnan
Thailand	PF	PF	PF	PF	NF	NF	NF	NF	NF	PF	NF	Menurun
Timor Leste	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	F	F	F	F	Meningkat

Sumber: (Freedom House, 2020)

Keterangan: F (*Free*/Bebas), PF (*Partly Free*/Bebas Sebagian), NF (*Not Free*/Tidak Bebas). Status ini merupakan kombinasi skor keseluruhan yang dibuat oleh Freeom House yang diberikan untuk klasifikasi kebebasan sipil.

atau “pasal karet” dengan pelarangan-pelarangan – termasuk di dalamnya istilah “ujaran kebencian”, “anti-pancasila”, atau “anti pemerintah” – yang dapat menjadi alat manipulasi politik, rawan disalahgunakan dan dinilai mengganggu kebebasan, baik kebebasan berpendapat maupun pers dan media.

Di Malaysia, harapan menguatnya demokrasi muncul ketika koalisi oposisi memenangkan pemilu pada Mei 2018 lalu. Kemenangan pertama oposisi setelah lebih dari 60 tahun pemerintahan dikuasai oleh Barisan Nasional (BN) pimpinan United Malays National Organization (UMNO). Kemenangan tersebut justru bertolak belakang dengan tren global demokrasi yang tengah diuji oleh populisme. Transisi pimpinan pasca 2018 sebenarnya tidak

sepenuhnya membawa perubahan signifikan pada konstelasi elite penguasa di Malaysia. Di samping itu, perubahan politik juga masih belum sepenuhnya menghapus regulasi dan undang-undang yang mengganggu berjalannya demokrasi. Setidaknya beberapa regulasi seperti: *the Official Secrets Act (OSA)*, *the Sedition Act 1948*, *the Communications and Multimedia Act (CMA)*, *Printing Presses and Publications Act 1984*, dan regulasi lain yang dinilai potensial membatasi kebebasan. Kondisi demokrasi di Malaysia masih dinilai rentan dan belum banyak mengalami perubahan yang lebih baik. Selama satu dekade sejak 2010, kondisi kebebasan di Malaysia masuk dalam kategori bebas sebagian (*partly free*).

Sementara itu, kondisi kebebasan dan demokrasi di Filipina berjalan sangat rumit. Dalam sejarahnya, Filipina tidak lepas dari berbagai kasus kekerasan, teror, kriminalitas, korupsi, persekusi, narkoba, dan persoalan sosial politik lain. Kondisi demikian memberi dukungan pada figur yang dinilai mampu membawa pesan terhadap anti-kriminalitas dan menciptakan stabilitas. Maka, pada pemilu 2016, terpilihlah Rodrigo Duterte sebagai presiden Filipina (Aminuddin, 2020). Gaya kepemimpinan yang personalistik, karakteristik otoriter, dan upaya menindas oposisi, serta mengabaikan mekanisme *check and balances*, membawa kekhawatiran menurunnya demokrasi di Filipina lebih dalam. Di bawah kepemimpinannya, atas nama perang melawan narkoba, hak asasi dan kebebasan sipil menurun

³ Untuk setiap negara dan wilayah, Freedom House menganalisis proses pemilu, pluralisme dan partisipasi politik, fungsi pemerintah, kebebasan berekspresi dan berkeyakinan, hak berserikat dan berorganisasi, supremasi hukum, serta otonomi pribadi dan hak individu. Status ini masing-masing mencakup klasifikasi yang luas dari skor yang tersedia. Negara atau wilayah dalam satu kategori, dapat saja memiliki situasi hak asasi manusia yang sangat berbeda. Misalnya, mereka yang berada di ujung bawah kategori Bebas (*Free*/F) tidak berarti bahwa suatu negara atau wilayah menikmati kebebasan yang sempurna atau tidak memiliki masalah serius, hanya saja ia menikmati kebebasan yang relatif lebih banyak daripada yang diberi peringkat Bebas Sebagian (*Partly Free*/PF) atau Tidak Bebas (*Not Free*/NF). Penjelasan metodologi oleh Freedom House dapat dilihat pada: <https://freedomhouse.org/reports/freedom-world/freedom-world-research-methodology>

secara dramatis, meningkatkan pengaruh politik polisi dan militer, serta mendorong persekusi dan tindakan main hakim oleh masyarakat. Freedom House mencatat kondisi demokrasi di Filipina selama sepuluh tahun stagnan pada kategori bebas sebagian (*partly free*).

Adapun di Singapura, demokrasi kerap berkutut dengan persoalan pemilu yang dinilai tidak bebas dan adil. Mekanisme dan institusi penyelenggara pemilu kerap dinilai tidak independen dan bersekongkol untuk menguntungkan partai berkuasa. Undang-Undang dan regulasi yang dinilai represif digunakan untuk membatasi oposisi, mengendalikan kebebasan sipil dan mengontrol media. Praktik demokrasi prosedural berjalan, tetapi persoalan mendasar terkait demokrasi masih menjadi masalah. Meski konstitusi negara memberi hak berserikat dan berkumpul, tetapi hak-hak tersebut faktanya memperoleh pembatasan. Undang-Undang Ketertiban Umum 2010, salah satunya, memberi hak bagi polisi untuk melarang seseorang atau kelompok untuk berkumpul. Seperti halnya Malaysia, ada banyak regulasi yang secara gamblang membatasi kebebasan, seperti *Internal Security Act*, *Sedition Act*, *Public Order Act* dan beberapa undang-undang serta regulasi lain. Freedom House mencatat bahwa tidak ada perubahan yang signifikan dalam perkembangan demokrasi di Singapura. Dalam satu dekade, status kebebasan di Singapura adalah bebas sebagian (*partly free*).

Sementara untuk Thailand, indeks demokrasinya juga terus mengalami penurunan. Sejak 2014 hingga 2020, kondisi kebebasan Thailand adalah tidak bebas (*not free*) – dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang bebas sebagian (*party free*). Sejarah demokrasi di Thailand didominasi oleh kontrol kuat autokratis atas politik, ekonomi, dan masyarakat. *The National Council for Peace and Order* (NCPO) Thailand memonopoli penggunaan kekuatan atas nama ketertiban dan stabilitas. NCPO bahkan melakukan intervensi determinan dalam proses politik seperti pemilu, aktivisme sipil, dan kebebasan pers. Persoalan yang sama seperti di Indonesia, Malaysia dan Singapura, yakni adanya regulasi yang multitafsir dan

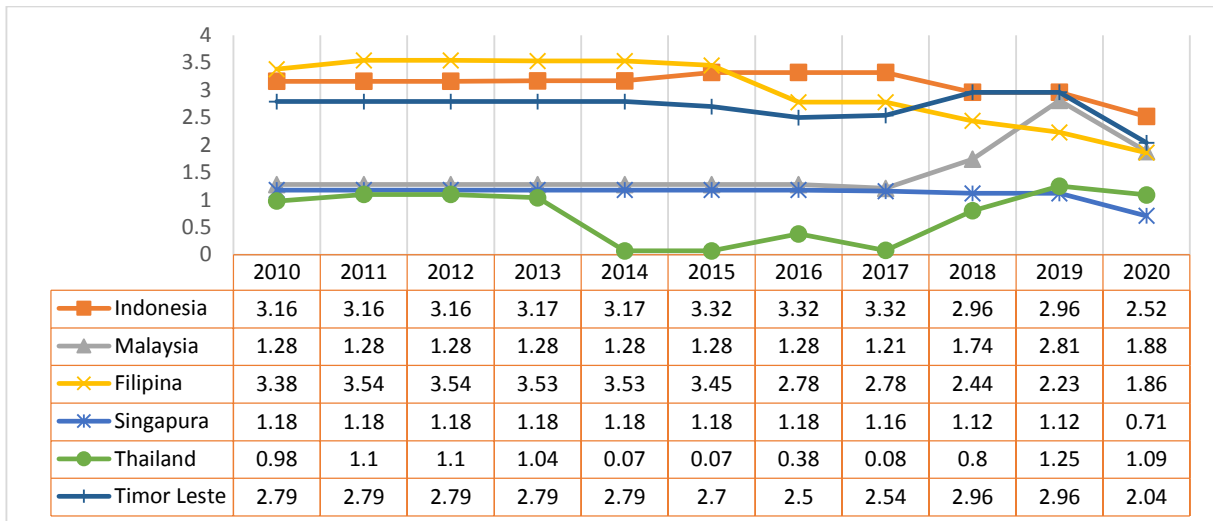
mengancam kebebasan sipil, menjadi salah satu faktor yang menjadikan kondisi demokrasi di Thailand terus merosot.

Dibandingkan dengan lima negara lain, Timor Leste menjadi negara yang mengalami perkembangan demokrasi yang cukup baik. Dalam satu dekade, status kebebasan di Timor Leste masuk dalam kategori bebas (*free*) – meningkat dibandingkan sebelumnya yang berstatus bebas sebagian (*partly free*). Meski demikian, demokrasi di Timor Leste bukan berarti tanpa persoalan. Kebebasan sipil diterima secara umum. Namun, *Penal Code* (di Indonesia seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHPP) memuat pasal tentang informasi palsu dan fitnah, yang menciptakan kekhawatiran pembatasan kebebasan dan mundurnya demokrasi. Secara umum, ujian yang dihadapi oleh Timor Leste dalam pembangunan demokrasi adalah bekerjanya institusi-institusi demokrasi dan stabilitas sistem politik.

Di luar enam negara yang dibahas dalam tulisan ini, kondisi demokrasi di lima negara lain di Asia Tenggara jauh lebih mengkhawatirkan. Bangkitnya populisme, sentralisasi kekuasaan di tangan pemerintahan berkuasa, kudeta militer, menguatnya politik identitas, serta upaya-upaya membatasi kebebasan, mewarnai kondisi demokrasi di Asia Tenggara secara umum. Hanya Timor Leste yang empat tahun terakhir hingga 2020 tengah menikmati kenaikan status kebebasan, meski kekhawatiran terjadinya kemunduran juga turut menyertai.

Kondisi Kebebasan Pers: Perbandingan Beberapa Aspek di Enam Negara

Begitu banyak aspek dan faktor terkait kebebasan pers dan media. Beberapa aspek dapat diamati melalui data berdasarkan data survei. Sementara beberapa aspek lain memerlukan uraian yang mendalam. Artikel ini mengambil aspek-aspek berdasarkan data survei terkait kebebasan pers dan media yang disajikan oleh V-Dem Institute. Terdapat lima aspek yang merefleksikan aspek-aspek penting kondisi di beberapa negara untuk dibandingkan.



Sumber: V-Dem Dataset v10 (Coppedge, M., et al., 2020)

Grafik 3. Aspek Upaya Penyensoran dari Pemerintah di Enam Negara⁴

Aspek pertama adalah upaya penyensoran oleh pemerintah yang berkuasa (Grafik 3). Aspek ini menunjukkan adanya upaya dari pemerintahan untuk mengintervensi pemberitaan atau konten media. Upaya penyensoran dapat memiliki beragam bentuk, dalam bentuk tidak langsung misalnya, yang mencakup adanya tindakan pemberian izin atau frekuensi siaran yang bermotif politik, menarik dukungan keuangan, upaya mempengaruhi percetakan dan jaringan distribusi, pemberian syarat izin penerbitan media yang memberatkan, adanya tarif yang tinggi, serta tindakan penyupaan. Bentuk lain adalah penyensoran langsung seperti mencabut izin penerbitan dan penyiaran, atau intimidasi terhadap organisasi media dan jurnalis atau pekerja media.

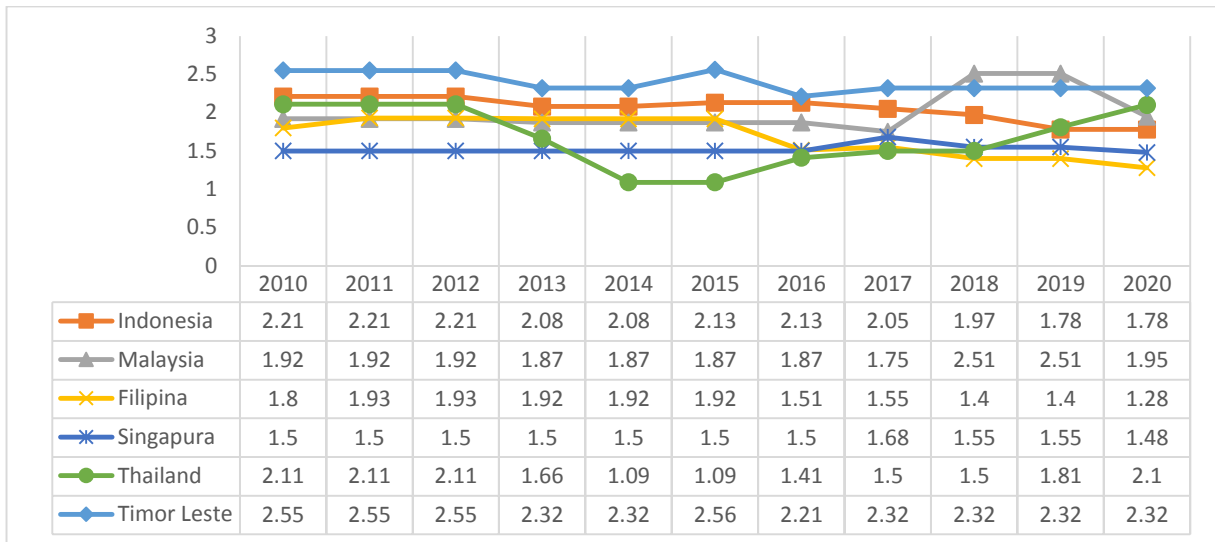
Dari enam negara, dalam satu dekade, upaya penyensoran paling buruk secara konsisten terlihat di Singapura dan Thailand. Singapura menjadi negara dengan skor paling

buruk (mendekati 0). Fenomena penyensoran paling jelas tampak dari keberadaan *Infocomm Media Development Authority* (IMDA) yang memiliki kekuasaan untuk menyensor berbagai bentuk konten jurnalistik. Tuntutan pencemaran nama baik dianggap hal biasa dan terkadang disertai dengan tuduhan penghasutan yang dapat dihukum hingga tujuh tahun penjara.

Malaysia, sempat mengalami kondisi lebih baik di tahun 2019 dalam aspek penyensoran, tetapi kembali memperoleh skor yang rendah di tahun 2020. Namun demikian, jika melihat tren keseluruhan, keenam negara sama-sama mengalami penurunan skor yang menunjukkan adanya upaya kuat penyensoran oleh pemerintah. Sekalipun Indonesia dan Filipina selama 2010-2015 memiliki tren yang positif, pada akhirnya juga mengalami penurunan skor sejak 2016. Artinya, hampir di enam negara dengan indeks demokrasi yang lebih baik di Asia Tenggara, menghadapi masalah yang sama, yaitu pemerintah semakin kuat melakukan intervensi dalam kontrol dan sensor media. Hal ini linier dengan menurunnya kualitas demokrasi dan kebebasan di hampir keenam negara (kecuali Timor Leste) yang juga mengalami kemunduran demokrasi. Kondisi lebih buruk terjadi di lima negara lain di Asia Tenggara yang memiliki skor kebebasan rendah.

Kedua, aspek gangguan terhadap jurnalis atau pekerja media (Grafik 4). Aspek ini menunjukkan apakah terjadi kekerasan terhadap

⁴ Skor dalam aspek ini dibagi dalam beberapa kategori: Skor 0 (paling buruk): menunjukkan adanya upaya penyensoran (dari rezim) yang bersifat langsung dan rutin. Skor 1: adanya upaya menyensor secara tidak langsung tetapi bersifat rutin. Skor 2: upaya penyensoran bersifat langsung tetapi terbatas pada masalah-masalah yang sangat sensitif. Skor 3: upaya penyensoran bersifat tidak langsung dan terbatas pada isu-isu yang sangat sensitif. Skor 4: pemerintah jarang mencoba menyensor media besar dengan cara apapun, dan ketika terdapat upaya tersebut, pejabat yang bertanggung jawab biasanya dihukum.



Sumber: V-Dem Dataset v10 (Coppedge, M., et al., 2020)

Grafik 4. Aspek Gangguan terhadap Jurnalis di Enam Negara⁵

individu jurnalis atau pekerja media. Tindak kekerasan dapat terjadi dalam berbagai macam bentuk, seperti intimidasi, fitnah, penangkapan, penahanan, pemukulan, atau pembunuhan oleh aktor pemerintah atau non-pemerintah (kelompok kekerasan, simpatisan partai, dan sebagainya).

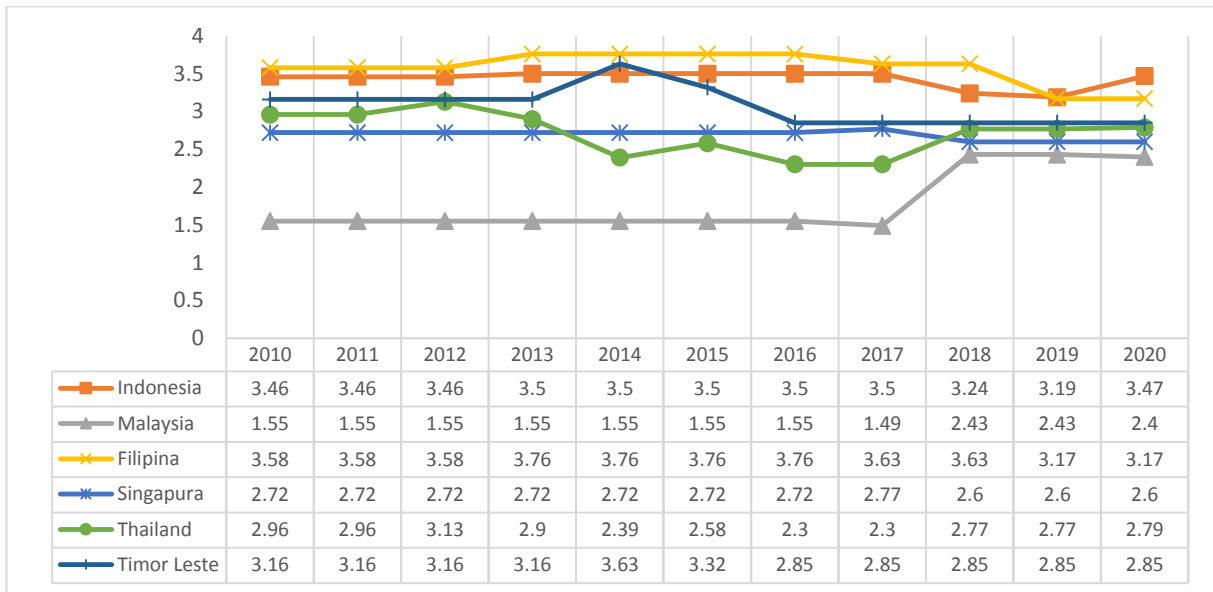
Selama 10 tahun (2011-2020), skor pada aspek gangguan terhadap jurnalis di enam negara berkisar antara 1 hingga 2,5. Tidak ada satu pun negara dengan skor 3 dan 4. Artinya, praktik gangguan terhadap jurnalis kerap terjadi di enam negara. Singapura adalah negara dengan gangguan terhadap pekerja jurnalistik tertinggi. Selama 10 tahun, Singapura berada pada kisaran skor 1,5. Malaysia yang sempat memiliki skor 2,5 di tahun 2019, turun kembali pada tahun 2020 (1,95). Meski grafis menunjukkan angka yang fluktuatif di tiap negara, bahkan Thailand mengalami tren meningkat selama dua tahun, tetapi secara umum dapat disimpulkan masih terdapat gangguan kepada jurnalis atau pekerja media.

⁵Skor dalam aspek ini dibagi dalam beberapa kategori: Skor 0: Tidak ada jurnalis yang berani terlibat dalam kegiatan jurnalistik yang akan menyinggung aktor berpengaruh karena diganggu atau tindakan lain yang lebih buruk pasti akan terjadi. Skor 1: Beberapa jurnalis terkadang menyinggung aktor berpengaruh, tetapi mereka hampir selalu diganggu atau lebih buruk dan akhirnya dipaksa untuk berhenti. Skor 2: Beberapa jurnalis yang menyinggung aktor kuat dipaksa untuk berhenti tetapi yang lain berhasil

Aspek ketiga berkaitan dengan kebebasan pers dan media adalah bias media – terhadap partai atau kandidat oposisi (Grafik 5). Bias media dapat dipahami sebagai pemberitaan yang dibelokkan atau disimpangkan, dipilah, dimanipulasi, didistorsi, atau dicampur dengan pandangan subyektif jurnalis atau produser (termasuk editor, redaktur, bahkan pemilik media). Istilah “bias media” menyiratkan bias yang bertentangan dengan standar dan etika jurnalisisme.

Berbeda halnya dengan dua aspek sebelumnya, aspek ketiga (dan aspek berikutnya, yang dibandingkan dalam artikel ini) terjadi bukan hanya karena faktor eksternal media atau jurnalis, tetapi juga disebabkan karena faktor internal di dalam media (seperti rutinitas media, kualitas dan kepentingan jurnalis, kepentingan ekonomi-politik media, serta keberpihakan dan kedekatan dengan partai atau elite politik tertentu karena motif yang bisa beragam). Meski bias media dapat berkenaan dengan berbagai macam isu, data V-Dem dalam aspek ini secara spesifik terkait dengan

melanjutkan praktik jurnalisisme secara bebas untuk jangka waktu yang lama. Skor 3: Jarang ada jurnalis yang diganggu karena menyinggung aktor berpengaruh, dan jika ini terjadi, mereka yang bertanggung jawab atas pelecehan tersebut akan diidentifikasi dan dihukum. Skor 4: Jurnalis tidak pernah diganggu oleh pemerintah atau aktor non-pemerintah yang berkuasa saat terlibat dalam kegiatan jurnalistik yang sah.



Sumber: V-Dem Dataset v10 (Coppedge, M., et al., 2020)

Grafik 5. Bias Media di Enam Negara⁶

bagaimana media melakukan pemberitaan yang tidak memihak dan proporsional, baik kepada kelompok penguasa maupun oposisi.

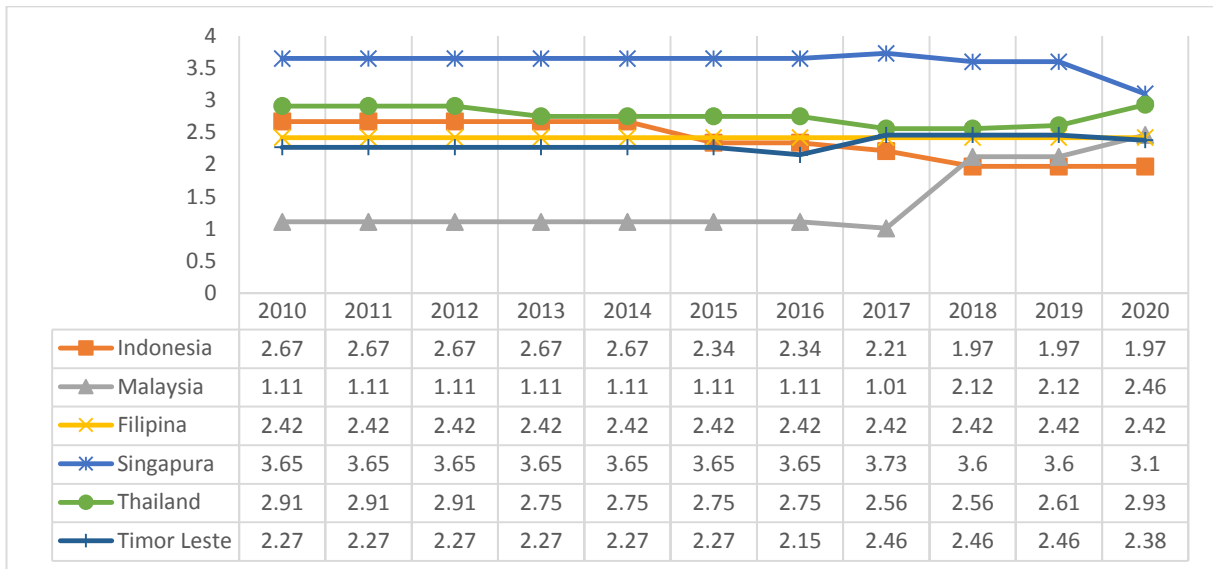
Selama tahun 2015 hingga 2020, dari enam negara yang dibahas dalam tulisan ini, hanya Indonesia dan Filipina yang memiliki skor di atas 3. Artinya, pemberitaan media di dua negara tersebut masih relatif berimbang antara partai atau kandidat pendukung pemerintah dengan oposisi, meskipun mungkin saja porsi pemberitaan terhadap kelompok pemerintah cenderung lebih banyak. Sementara pada empat

negara lain, pemberitaan media masih dinilai bias dan condong kepada partai atau kandidat pemerintah. Timor Leste masih memiliki skor di atas 3 hingga tahun 2015, kemudian pada tahun 2016 hingga 2020 menurun hingga berada pada skor 2,85.

Dalam penjelasannya, V-Dem memberi catatan perlunya kehati-hatian dalam melihat pergeseran skor pada aspek bias media, terutama berkenaan dengan momen pemilu di setiap negara. Pemberitaan media, seperti di Indonesia, misalnya, dipengaruhi oleh berbagai faktor berkaitan dengan pemberitaan kepada pemerintah dan oposisi oleh media yang menjadi partisan. Konstelasi media pendukung pemerintah dan oposisi, atau kepada kandidat presiden tertentu, juga berpotensi menciptakan bias. Media kerap kali terjebak pada tarik-menarik kepentingan ekonomi politik, kebutuhan untuk memperoleh modal melalui investasi dan iklan, serta kepentingan pemilik media beserta jaringan bisnisnya, yang mengarahkan media untuk cenderung memproduksi berita bias.

Aspek keempat adalah *media corrupt* atau korupsi media (Grafik 6). Praktik ini biasanya melibatkan penerimaan pembayaran atau imbalan tertentu baik langsung atau tidak langsung (finansial atau bentuk lain) untuk meliput (atau tidak meliput) berita tertentu, atau untuk mengubah pemberitaan untuk

⁶ Skor dalam aspek ini dibagi dalam beberapa kategori: Skor 0: Media cetak dan siaran hanya meliput partai atau kandidat dalam pemerintahan (resmi dan yang berkuasa), atau tidak memiliki liputan politik, atau tidak ada partai atau kandidat oposisi untuk diliput. Skor 1: Media cetak dan siaran tidak hanya meliput partai atau kandidat pemerintah tetapi semua partai atau kandidat oposisi hanya menerima liputan negatif. Skor 2: Media cetak dan penyiaran meliput beberapa partai atau kandidat oposisi kurang lebih secara tidak memihak, tetapi mereka hanya memberikan liputan negatif atau tidak sama sekali kepada setidaknya satu partai atau kandidat yang layak diberitakan. Skor 3: Media cetak dan penyiaran meliput partai atau kandidat oposisi kurang lebih secara tidak memihak, tetapi mereka memberikan liputan yang berlebihan kepada partai atau kandidat yang memerintah. Skor 4: Media cetak dan penyiaran meliput semua partai dan kandidat yang layak diberitakan kurang lebih secara tidak memihak dan proporsional dengan kelayakan berita mereka.



Sumber: V-Dem Dataset v10 (Coppedge, M., et al., 2020)

Grafik 6. Aspek Korupsi Media di Enam Negara⁷

tujuan tertentu, seperti membentuk opini atau menyesatkan khalayak.

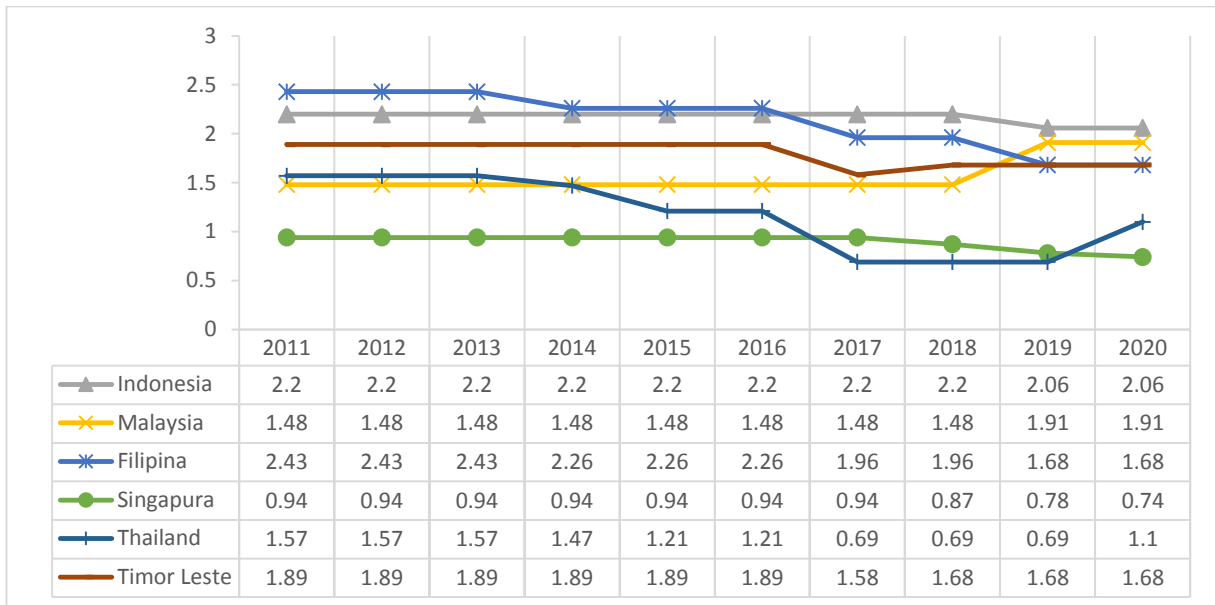
Aspek yang mengejutkan dalam perbandingan terhadap enam negara adalah korupsi media. Singapura adalah negara dengan skor tertinggi jika melihat rata-rata skor dalam kurun waktu 5 dan 10 tahun terakhir hingga tahun 2020. Meski cenderung menurun, skor Singapura bahkan masih lebih baik dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara. Malaysia memiliki skor yang mencolok dengan skor pada aspek korupsi media cenderung naik sejak tahun 2018, dibanding tahun sebelumnya yang stagnan di angka 1. Sementara Indonesia menjadi negara dengan skor yang terus turun semenjak tahun 2017. Selama tahun 2017 hingga 2020, skornya semakin memburuk di bawah angka 2. Tiga negara lain, Filipina, Thailand dan Timor Leste, relatif berada pada angka yang tidak banyak berubah selama 10 tahun.

⁷ Skor dalam aspek ini dibagi dalam beberapa kategori: Skor 0: Media sangat diarahkan oleh pemerintah sehingga pembayaran semacam itu tidak diperlukan untuk memastikan liputan pro-pemerintah atau tidak efektif dalam menghasilkan liputan anti-pemerintah. Skor 1: Jurnalis, penerbit, dan penyiar secara rutin mengubah liputan berita dengan imbalan pembayaran. Skor 2: Adalah umum, tetapi tidak rutin, bagi jurnalis, penerbit, dan penyiar untuk mengubah liputan berita dengan imbalan pembayaran. Skor 3: Tidaklah normal bagi jurnalis, penerbit, dan penyiar untuk mengubah liputan berita dengan imbalan pembayaran, tetapi itu terjadi

Secara umum, sebagian besar enam negara ini berada pada kisaran skor 2-3. Artinya, sebagian besar di antara negara tersebut, aktivitas mengubah berita oleh jurnalis, penerbit dan penyiar dengan imbalan dan pembayaran tertentu masih terjadi secara umum. Ada berbagai alasan mengapa praktik korupsi media dapat terjadi, seperti persoalan norma dan nilai dalam organisasi media untuk menjaga integritas dan kualitas pemberitaan, upah pekerja media yang masih tergolong rendah, serta kepentingan lain yang mendorong praktik korupsi media (Yang, 2021).

Aspek kelima adalah swasensor (*self-censorship*) atau sensor mandiri oleh media (Grafik 7). Berbeda dengan upaya sensor oleh pemerintah, swasensor dilakukan atas inisiatif sendiri oleh pekerja media, jurnalis, atau organisasi media tanpa tekanan terbuka dari pihak atau otoritas tertentu. Meski dapat mencakup isu-isu yang luas karena berkaitan dengan etika atau norma tertentu, namun aspek swasensor dalam hal ini fokus pada ada tidaknya tindakan penyensoran diri di kalangan jurnalis ketika meliput isu-isu yang dianggap sensitif secara politik oleh pemerintah.

sesekali, tanpa ada yang dihukum. Skor 4: Jurnalis, penerbit, dan penyiar jarang mengubah liputan berita dengan imbalan pembayaran, dan jika diketahui, seseorang dapat dihukum.



Sumber: V-Dem Dataset v10 (Coppedge, M., et al., 2020)

Grafik 7. Aspek Swasensor oleh Media di Enam Negara ⁸

Data V-Dem menunjukkan bahwa praktik swasensor kerap terjadi hampir di keenam negara. Indonesia menjadi negara dengan skor tertinggi dalam kurun waktu lima dan sepuluh tahun terakhir hingga tahun 2020 – meskipun tren sejak 2018 menunjukkan skor yang menurun. Dengan skor di kisaran angka 2, di Indonesia terjadi swasensor, tetapi berada pada isu-isu yang dianggap sangat sensitif. Sementara lima negara lain, berada di bawah angka 2 dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Skor terendah adalah Singapura dan Thailand. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir skor keduanya berada di bawah angka 1. Hal ini menunjukkan adanya swasensor oleh media yang dilakukan secara umum di negara-negara tersebut. Di Singapura, swasensor dilakukan bisa jadi karena afiliasi pemilik media dengan pemerintah, sedangkan di Thailand swasensor menjadi strategi bertahan agar terus eksis karena adanya tekanan dari pemerintah.

⁸ Skor dalam aspek ini dibagi dalam beberapa kategori: Skor 0: Swasensor bersifat lengkap dan menyeluruh. Skor 1: Swasensor bersifat umum tetapi tidak lengkap dan menyeluruh. Skor 2: Terdapat swasensor pada beberapa isu politik yang sangat sensitif tetapi tidak pada isu-isu yang cukup sensitif. Skor 3: Ada sedikit atau tidak ada swasensor di kalangan jurnalis.

Meski seolah tidak terdapat tekanan terbuka, tetapi media di kedua negara cukup berhati-hati dalam melakukan pemberitaan yang dianggap provokatif – disebabkan adanya regulasi atau undang-undang tertentu yang dapat mencabut izin operasi institusi pers dan media (Fong, 2015). Begitu juga di Filipina, skor pada aspek ini menurun sejak 2016, swasensor juga dilakukan karena adanya regulasi yang mengancam eksistensi dan pekerja media. Praktik swasensor mungkin juga dapat dibaca sebagai upaya bertahan agar institusi media tetap dapat melakukan aktivitas produksi berita, serta menghindari ancaman atau upaya pembubaran organisasi media oleh pemerintah atas nama undang-undang.

Kemunduran Kebebasan Pers di Asia Tenggara

Guna melihat bagaimana kondisi kebebasan pers dan media secara umum di keenam negara, dapat dilihat melalui peringkat yang disusun oleh RSF terhadap 180 negara di dunia (Tabel 3). Di antara enam negara, Timor Leste menjadi negara dengan peringkat tertinggi di antara lima negara lain, yang selama lima tahun terakhir (2016-2020) berada pada kisaran rangking RSF 78-99 dari 180 negara. Hal ini selaras jika melihat data V-Dem terkait aspek

Tabel 3. Peringkat Kebebasan Pers di Enam Negara terhadap 180 Negara

Negara	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Timor Leste	90	77	103	99	98	95	84	78
Malaysia	145	147	147	146	144	145	123	101
Indonesia	139	132	138	130	124	124	124	119
Filipina	147	149	141	138	127	133	134	136
Thailand	135	130	134	136	142	140	136	140
Singapura	149	150	153	154	151	151	151	158

Sumber: (RSF, 2020)

upaya penyensoran oleh pemerintah dan aspek gangguan terhadap jurnalis di Timor Leste yang memiliki skor relatif lebih baik dibandingkan lima negara lain.

Sementara lima negara lain berada pada kisaran peringkat 130-158 dari 180 negara selama kurun waktu lima tahun. Indonesia menjadi negara yang memiliki peringkat tertinggi kedua setelah Timor Leste, dengan peringkat yang mengalami kenaikan sejak 2016 dan berada pada peringkat 119 di tahun 2020. Adapun Malaysia mengalami kenaikan peringkat sejak tahun 2018. Pada tahun 2020 Malaysia berada pada peringkat 101 – peringkat yang bahkan lebih baik daripada Indonesia pada tahun tersebut. Meski demikian, kekhawatiran terhadap kebebasan pers dan media bukan berarti tanpa ancaman. Malaysia dan Indonesia masih memiliki regulasi dan undang-undang yang memberi ruang untuk menekan pers dan media.

Dari keenam negara, Singapura, Filipina dan Thailand menjadi contoh paling negatif dalam hal kebebasan pers dan media. Kebebasan pers memang dijamin oleh konstitusi ketiga negara tersebut. Namun, dalam praktiknya, terdapat pembatasan dan kontrol terhadap media secara ketat oleh rezim berkuasa. Singapura adalah negara dengan peringkat terendah, yaitu berada pada peringkat 158 di tahun 2020. Kondisi ini juga linier dengan aspek upaya penyensoran oleh pemerintah dan aspek gangguan terhadap jurnalis di tiga negara tersebut. Kenaikan dan penurunan peringkat ini memang tidak memberikan gambaran yang lebih

detail seperti halnya lima aspek sebelumnya, tetapi dapat menggambarkan kenaikan dan penurunan kondisi kebebasan pers suatu negara dibandingkan dengan negara yang lain.

Thailand dan Filipina dalam catatan RSF dan Freedom House dinilai sebagai tempat yang berbahaya bagi jurnalis. Dalam sejarahnya, Filipina menjadi salah satu negara dengan jumlah jurnalis terbunuh paling tinggi (Høiby & Ottosen, 2019). Hal ini juga tampak pada skor pada aspek gangguan terhadap jurnalis yang menempatkan Filipina sebagai negara dengan skor terendah dibandingkan lima negara lain. Sementara di Thailand, pemerintah semakin represif terhadap kritik yang ditujukan kepada pemerintah dan kerajaan. Tindakan kritik oleh pers dan kelompok oposisi, dibalas dengan penangkapan dan hukuman yang difasilitasi oleh beberapa undang-undang dan regulasi yang memberi ruang bagi pemerintah melakukan tindakan anti-demokrasi.

Kebebasan pers di Asia Tenggara mengalami pukulan dalam lima tahun terakhir jika melihat bagaimana skor terkait kebebasan pers yang cenderung mengalami penurunan dan stagnan berada pada skor yang rendah. Menurunnya kebebasan pers menjadi salah satu tanda kemunduran demokrasi di kawasan Asia Tenggara secara umum (kecuali Timor Leste yang memiliki kondisi lebih baik dalam beberapa aspek dibandingkan dengan lima negara lain).

Mayoritas pemerintah dan rezim di enam negara memiliki peluang dan potensi melakukan penekanan terhadap kebebasan pers

dan media. Pers di sebagian besar negara-negara di Asia Tenggara, di bawah pemerintahan yang tidak demokratis, “dipaksa” berperan sebagai pendukung *status quo*. Mempertimbangkan peran pers dan media juga berfungsi mengkonstruksi keadaan perkembangan politik negara, mayoritas organisasi media di Asia Tenggara, Malaysia, Filipina, Singapura (begitu juga Brunei, Kamboja, Laos dan Myanmar – negara yang tidak diteliti dalam artikel ini), terpaksa bertindak sebagai agen stabilitas bagi *status quo* karena pemerintah benar-benar berkuasa atas sebagian besar organisasi pers dan media.

Hanya Indonesia dan Timor Leste yang memberikan ruang bagi organisasi pers dan media untuk dapat bertindak juga sebagai agen pengekan yang turut mengawasi proses politik. Sementara organisasi pers dan media di Thailand, masih dapat memainkan peran sebagai agen perubahan yang dapat mempengaruhi opini publik untuk menciptakan instabilitas politik dan pergantian perdana menteri dan kabinet. Meski demikian, dengan mempertimbangkan kehadiran undang-undang dan regulasi yang dapat menjadi senjata pengekan pers, serta masih adanya gangguan terhadap organisasi dan pekerja media, lanskap kebebasan pers di Asia Tenggara masih berpotensi menjadi sangat dinamis.

Di luar aspek upaya sensor oleh pemerintah dan gangguan terhadap jurnalis, aspek bias media terhadap pemerintah dan oposisi, korupsi media, serta swasensor juga mengganggu kebebasan pers di Asia Tenggara. Meski dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebab dominan yang berbeda di tiap negara, tetapi faktor internal ini juga tak lepas dari hubungan antara kekuasaan dengan pers dan media. Di Indonesia, misalnya, fenomena konglomerasi media dengan kepemilikan media besar yang berpusat hanya pada beberapa konglomerat, menjadikan media mudah menjadi partisan partai atau kandidat tertentu ketika pemilu (Tapsell, 2017). Bukan hanya keterkaitan dengan pemilik media, terdapat pula hubungan mutualisme antara jurnalis dengan pejabat pemerintahan, misalnya ketika seorang jurnalis memperoleh imbalan dan keuntungan

tertentu dari pemerintah melalui tulisan atau pemberitaannya. Pola hubungan antara pemilik media dan jurnalis dengan pemerintah, serta partai atau kandidat tersebut, mendorong media untuk memilah apa yang diberitakan dan tidak, mendorong media untuk melakukan bias, swasensor, dan korupsi.

Di negara dengan lingkungan yang sulit bagi jurnalis, dengan potensi ancaman terhadap organisasi dan pekerja media, seperti yang terjadi di Filipina, cenderung memicu kecemasan dan mendorong swasensor. Para jurnalis tahu di mana dan kapan mereka tidak boleh melewati “batas” dan “ikut campur”, baik terhadap pemerintah, orang-orang kuat, kelompok masyarakat atau perusahaan tertentu. Perlu kehati-hatian untuk memilah apa yang boleh dan tidak boleh dilaporkan. Di Indonesia, kondisi ini masih dapat ditemui di level lokal pada kejadian yang dilaporkan Asosiasi Jurnalis Independen tentang intimidasi terhadap jurnalis (Ramadhan, 2019; Wijayanto & Hasfi, 2021).

Namun, jika organisasi dan pekerja media harus selalu mempertimbangkan setiap konsekuensi dari apa yang mereka beritakan, hal tersebut dapat mengubah secara radikal peran substantif mereka dalam demokrasi. Jurnalis dan media harus mempertimbangkan tidak hanya bagaimana sebuah berita dapat dipublikasikan, tetapi juga cara bagaimana berita ditafsirkan oleh pembaca. Pertimbangan-pertimbangan tersebut mendorong praktik swasensor dan bias media yang lebih besar.

Di sebagian besar negara di Asia Tenggara, komitmen terhadap kebebasan pers umumnya dirusak oleh undang-undang dan beberapa regulasi yang justru memberi batasan, kontrol ketat, dan intimidatif, baik terhadap organisasi maupun pekerja media. Undang-undang dan regulasi ini biasanya memiliki redaksi yang samar dan multitafsir – di Indonesia diistilahkan dengan “pasal karet”. Praktik ini paling nyata merefleksikan kemunduran demokrasi di Asia Tenggara – bahkan di enam negara yang diteliti pada artikel ini yang memiliki skor kebebasan tertinggi di antara negara-negara lain di kawasan yang sama.

Penutup

Dari lima aspek yang dijelaskan sebelumnya, dapat dilihat bahwa kondisi menurunnya demokrasi sejalan dengan memburuknya kebebasan sipil. Di negara dengan skor demokrasi yang rendah dan persoalan kebebasan sipil yang buruk, juga memiliki kebebasan pers dan media yang tidak cukup baik. Secara umum, Asia Tenggara tidak pernah menjadi kawasan yang mudah bagi organisasi dan pekerja media. Timor Leste, Indonesia dan Malaysia memiliki kondisi yang lebih baik dibandingkan tiga negara lain. Namun, kekhawatiran menurunnya kebebasan pers juga cukup terbuka mengingat masih ada regulasi yang memberikan ruang bagi pemerintah yang berkuasa untuk melakukan pembatasan dan kontrol terhadap kebebasan pers. Sementara Thailand, Filipina dan Singapura, masih dalam kondisi kebebasan pers yang buruk mengingat kondisi demokrasi juga mengalami stagnasi dan kemunduran. Di luar enam negara yang dibandingkan, Asia Tenggara memiliki negara lain yang dinilai sangat represif, yakni Laos, Vietnam, Kamboja dan Myanmar, yang oleh Freedom House digolongkan dalam kategori “tidak bebas” (*not free*) dalam hal kebebasan pers.

Tentu saja analisis dalam artikel ini masih memiliki keterbatasan dan peluang untuk dikembangkan. Riset dengan tema sejenis masih dapat dikembangkan lebih luas, misalnya, dengan membandingkan semua negara di Asia Tenggara, atau menggunakan aspek serta variabel yang lebih beragam. Terutama dalam aspek-aspek yang lebih spesifik seperti konglomerasi media, oligarki media, dan hubungan media dengan pemerintah yang berkuasa. Di samping itu, kebebasan internet dan tumbuhnya media sosial, yang juga menjadi perhatian oleh lembaga pemeringkat demokrasi seperti Freedom House, dapat menjadi aspek lain yang dapat menunjukkan keterkaitan antara demokrasi dengan kebebasan pers dan media.

Daftar Pustaka

- Aminuddin, M. F. (2020). Populist Promises, Democratic Fissures: Indonesia and the Philippines. *Global Asia*, 15, (1). https://globalasia.org/v15no1/cover/populist-promises-democratic-fissures-indonesia-and-the-philippines_m-faishal-aminuddin.
- Bermeo, N. (2016). On Democratic Backsliding. *Journal of Democracy*, (1), 5-19, doi:10.1353/jod.2016.0012.
- Coppedge, M., et al. (2020). V-Dem Dataset v10. Varieties of Democracy (V-Dem) Project. <https://doi.org/10.23696/vdemds20>.
- Deane, J. (2015). Media and communication in governance: It's time for a rethink. Dalam *A governance practitioner's notebook: Alternative ideas and approaches* (eds. A. Whaites et al.). OECD – DAC.
- Diamond, L. (2020). Democratic Regression in Comparative Perspective: Scope, Methods, and Causes. *Democratization* 28(1), 22-42. DOI: 10.1080/13510347.2020.1807517.
- Fong, S. Y. (2015). Censorship as Performance: A Case of Singapore Media Production. Dalam *Media, Margins and Popular Culture*. (hlm. 202-215). Palgrave Macmillan.
- Freedom House. (2014). *Freedom in the World 2014*. Rowman & Littlefield.
- Freedom House. (2020). *Freedom in the World*. Diakses dari <https://freedomhouse.org/report/freedom-world>.
- Høiby, M., & Ottosen, R. (2019). Journalism under pressure in conflict zones: A study of journalists and editors in seven countries. *Media, War & Conflict*, 12(1), 69–86. <https://doi.org/10.1177/1750635217728092>.
- Howard, M. E. (2019). *How Journalists and The Public Shape Our Democracy From Social Media And “Fake News” To Reporting Just The Facts*. Georgia Humanities Council
- Levitsky, S. & Way, L. (2015). The Myth of Democratic Recession. *Journal of Democracy* 26(1), 45-58. doi:10.1353/jod.2015.0007.
- Levitsky, S. & Ziblatt, D. (2018). *How Democracies Die*. Crown.
- McQuail, D. (1987). *Mass communication theory: An introduction*. Sage Publications, Inc.

- Ramadhan, M. F. S. (2019). Perkembangan Demokrasi dan Paradoks Kebebasan Pers di Indonesia: Tantangan dan Hambatan dalam Relasi antara Pers dengan Negara. Dalam Ramadhan, M F S. dkk, *Media, Kebudayaan dan Demokrasi: Dinamika dan Tantangannya di Indonesia Kontemporer* (hlm. 1-35). UB Press.
- Reporters Without Borders. (2020). *2020 World Press Freedom Index*. France: RSF. <https://rsf.org/en/ranking/2020>.
- Repucci, S. (2019). Freedom and the Media: A Downward Spiral. Freedom House. <https://freedomhouse.org/report/freedom-and-media/2019/media-freedom-downward-spiral>.
- Repucci, S. & Slipowitz, A. (2021). *Freedom in the World 2021: Democracy Under Siege*. Freedom House. <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2021/democracy-under-siege>.
- Stier, S. (2015). Democracy, autocracy and the news: the impact of regime type on media freedom. *Democratization*, 22(7), 1273-1295. DOI: 10.1080/13510347.2014.964643.
- Tapsell, R. (2017). *Kuasa Media di Indonesia: Kaum Oligarki, Warga, dan Revolusi Digital*. Marjin Kiri.
- Trappel J. & Tomaz T. (2021) Democratic performance of news media Dimensions and indicators for comparative studies. Dalam Josef Trappel & Tales Tomaz (Eds). *The Media for Democracy Monitor 2021*. Vol. 1. Nordicom University of Gothenburg.
- Waldner, D. & Lust, E. (2018). Unwelcome change: Coming to terms with democratic backsliding. *Annual Review of Political Science*, 21(1), 93-113, <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-050517-114628>.
- Warburton, E. (2020). Deepening Polarization and Democratic Decline in Indonesia. Dalam Carothers, T. & O'Donohue, A. *Political Polarization in South and Southeast Asia: Old Division, New Dangers* (hlm. 25-40). Carnegie Endowment for International Peace.
- Wijayanto & Hasfi, N. (2021). Kebebasan Pers dalam Ancaman: Indonesia setelah Dua Dekade Reformasi Politik. Dalam Aminuddin M. F & Prasetyawan, W. *Pasang Surut Demokrasi: Refleksi Politik Indonesia 1999-2019* (hlm. 103-138). LP3ES.
- Yang, A., (2012). Assessing Global Inequality of Bribery for News Coverage: A CrossNational Study. *Mass Communication and Society* 15(2), 201-224. doi: 10.1080/15205436.2011.566826